

# LKJIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perindustrian dan  
Tenaga Kerja  
Kota Pekalongan

2025



**Website**

[dinperinaker.pekalongankota.go.id](http://dinperinaker.pekalongankota.go.id)



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggung- jawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami telah berupaya secara maksimal dan optimal agar sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan diatas, namun demikian kami menyadari bahwa belum sepenuhnya laporan ini dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan kelapangan hati kami siap menerima masukan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada tahun mendatang.

Pekalongan, 24 Februari 2026  
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kota Pekalongan

**BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690203 199803 2 004



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 75,25.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinperinaker 75,45 dengan katagori BB predikat Sangat Baik. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,27%.

2. Indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan target yang ditetapkan 52,33%.

Berdasarkan Capaian yang diperoleh oleh Dinperinaker Kota Pekalongan, bahwa Tahun 2025 mencapai 53,13%. Sehingga capaian untuk indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan dari target yang ditetapkan sebesar 101,52%.

3. Indikator Pertumbuhan Industri target yang ditetapkan 2,30%.

Berdasarkan realese yang dilaksanakan oleh BPS Kota Pekalongan, bahwa untuk Tahun 2025 angka untuk Pertumbuhan Industri belum realese. Sehingga capaian untuk indikator Pertumbuhan Industri belum dapat



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

disajikan.

Kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp12.565.548.704,00 atau 94,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp13.273.572.000,00.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan juga menghadapi beberapa kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, adapun kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya peserta pelatihan yang mendapat sertifikat uji kompetensi.
2. Masih terdapat perselisihan hubungan industrial yang memerlukan waktu penyelesaian cukup panjang.
3. Data Industri Kecil Menengah (IKM) belum representatif.

Dalam menghadapi kendala sebagaimana tersebut di atas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan pembekalan persiapan uji kompetensi kepada peserta pelatihan.
2. Optimalisasi klinik konsultasi hubungan industrial dengan percepatan penyelesaian perselisihan oleh mediator hubungan industrial.
3. Peningkatan pelatihan dan layanan desk bagi petugas pendata IKM.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

---

---

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3. KONDISI APARATUR .....	12
1.4. SARANA DAN PRASARANA .....	13
1.5. ISU STRATEGIS .....	18
BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....	20
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 .....	20
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026 ...	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	27
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
3.1 PENGUKURAN KINERJA .....	29
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	33
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	55
BAB IV    PENUTUP .....	62

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja. Dinperinaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja. Dinperinaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan mempunyai fungsi :



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Tenaga kerja;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Kesekretariatan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perindustrian;
- g. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP);
- h. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinperinaker yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Industri, Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, dan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Susunan Organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
  - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Perindustrian;



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

- f. UPTD (BLK); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana Struktur organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan, masing-masing unsur memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

### **2. Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas**

Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana tenaga kerja makro dan mikro;
- d. penyelenggaraan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- e. penyelenggaraan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

- f. penyelenggaraan fasilitasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- g. penyelenggaraan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- h. penyelenggaraan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- i. penyelenggaraan pelayanan antarkerja di daerah;
- j. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- k. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja;
- l. penyelenggaraan fasilitasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- m. penyelenggaraan pengelolaan informasi pasar kerja;
- n. penyelenggaraan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah;
- o. penyelenggaraan fasilitasi penerbitan perpanjangan IMTA;
- p. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- q. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

- c. pengoordinasian pengesahan peraturan perusahaan;
- d. pengoordinasian pendaftaran perjanjian kerjasama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
- f. pengoordinasian pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah;
- g. pengoordinasian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah;
- j. pengoordinasian pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
- k. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang perindustrian;



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

- b. perumusan bahan kebijakan bidang perindustrian;
- c. penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan industri;
- d. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
- e. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- h. penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan daerah;
- i. penyelenggaraan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan daerah;
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5. UPTD BLK**

Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional (Instruktur).

Tugas dan fungsi UPTD BLK diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

### **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Pada Dinperinaker dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- d. Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- e. Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada point (d) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada point (c) diatur oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

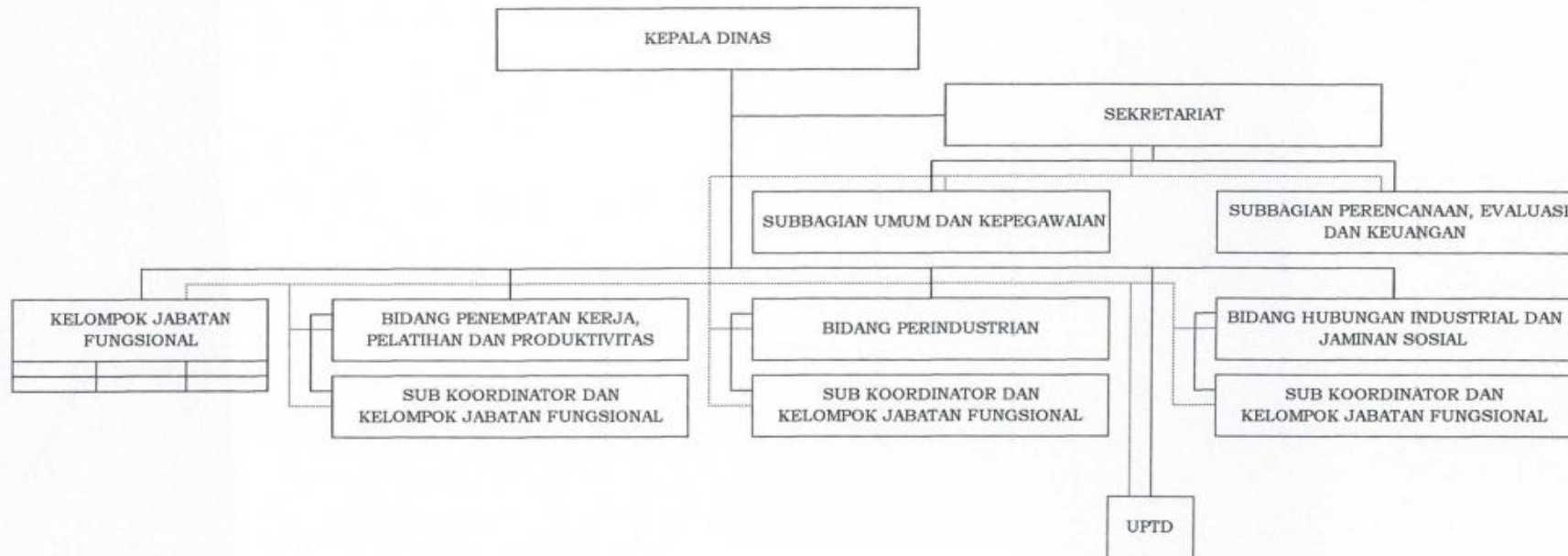


**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

**Struktur Organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 88 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



SEKRETARIS DAERAH

  
SRI RUMINGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap  
Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

**1.3. KONDISI APARATUR**

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai  
DINPERINAKEK Kota Pekalongan**

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	KEPALA DINAS			1				1	1
2	SEKRETARIS				1			1	1
3	UMPEG	4	1	8			11	2	13
4	REIVAL & KEUANGAN	2		4				6	6
5	PENTALATTAS	2		6	1		3	6	9
6	PERINDUSTRIAN	3		6	1		8	2	10
7	HUBIN & JAMSOS			4	2		2	4	6
8	UPTD BLK	6	1	16	3		20	6	26
	JUMLAH	17	2	45	8	0	44	28	72

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, Desember 2025

**Komposisi Pegawai DINPERINAKEK Kota Pekalongan  
Berdasarkan Golongan**

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)						TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	NON ASN	
1	KEPALA DINAS			1				1
2	SEKRETARIS			1				1
3	UMPEG		2		2	8	1	13
4	REIVAL & KEUANGAN		5			1		6
5	PENTALATTAS	1	4			3	1	9
6	PERINDUSTRIAN		5	1		3	1	10
7	HUBIN & JAMSOS		5	1				6
8	UPTD BLK	2	12	5		5	2	26
	JUMLAH	3	33	9	2	20	5	72

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, Desember 2025

Jumlah pegawai Dinperinaker Kota Pekalongan sampai dengan Agustus 2025, tercatat sebanyak 72 orang.

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

perbandingan laki-laki sebanyak 61,11% dan perempuan sebanyak 38,89%. Sedang untuk tingkat pendidikan, lulusan SLTA sebanyak 23,61%, lulusan D3 sebanyak 2,78%, lulusan S1 sebanyak 62,5%, lulusan S2 sebanyak 11,11%, dengan demikian yang terbanyak adalah dari lulusan S1.

Berdasarkan komposisi pegawai di Dinperinaker Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (45,83%), untuk pegawai golongan IV sebanyak 12,5%, golongan II sebanyak 4,17%. Sedangkan untuk pegawai PPPK Penuh waktu ada 2,78%, PPPK Paruh waktu ada 27,78% dan pegawai Non ASN ada 6,94%.

### 1.4 SARANA DAN PRASARANA

#### Prasarana dan Sarana Dinperinaker Kota Pekalongan Per 31 Desember Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Alat Pengangkat Lain-lain	1	Unit
2	Mesin Proses Lain-lain	2	Unit
3	Pompa Air	1	Unit
4	Jeep	1	Unit
5	Station Wagon	7	Unit
6	Sepeda Motor	31	Unit
7	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	2	Unit
8	Mesin Bubut	9	Unit
9	Mesin Frais	3	Unit
10	Mesin Press Hidrolik & Punch	1	Unit
11	Mesin Bor	3	Unit
12	Mesin Gergaji Logam	1	Unit
13	Mesin Gerinda	6	Unit
14	Mesin Meiling	1	Unit
15	Mesin Kompresor	4	Jaringan
16	Mesin Las Listrik	8	Unit
17	Mesin Penekuk/Lipat Plat	1	Unit
18	Mesin Pemetong Plat	2	Unit
19	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	7	Unit
20	Mesin Gerinda Tangan	6	Unit
21	Mesin Bor Tangan	10	Unit
22	Mesin Gulung Manual	5	Unit
23	Battery Charge	6	Unit
24	Perkakas Bengkel Lain-lain	14	Unit
25	Steam Cleaner	4	Unit



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

<b>NO</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
26	Mesin Gergaji	1	Unit
27	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	7	Unit
28	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	1	Unit
29	Peralatan Las Listrik	1	Unit
30	Peralatan Las Karbit	3	Unit
31	Bak Air	9	Unit
32	Perkakas Bangku Kerja	3	Unit
33	Pisau Peraut	3	Unit
34	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	4	Unit
35	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain	12	Unit
36	Jembatan Service Hidrolik	1	Unit
37	Dongkrak Mekanik	4	Unit
38	Perkakas Pengangkat Lain-lain	2	Unit
39	Tool Kit Set	4	Unit
40	Engine Stand	13	Unit
41	Perkakas Standar Lain-lain	1	Unit
42	Kunci Khusus Untuk Engine	1	Unit
43	Bor	16	Unit
44	Tanggem	3	Unit
45	Landasan Kenteng	1	Unit
46	Gunting Plat Tangan	2	Unit
47	Gunting Kain	3	Unit
48	Multisester Digital	1	Unit
49	Volt Meter Elektronik	4	Unit
50	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	16	Unit
51	Megger	2	Unit
52	Dial Test Indicator	2	Unit
53	Scanner (Universal Tester)	2	Unit
54	Tool Set	4	Unit
55	Alat Pendatar Takaran Bensin	2	Unit
56	Universal Clamp, Clamping Range 6 To 12 mm	4	Unit
57	Venier Caliver	24	Unit
58	Compresor Unit	1	Unit
59	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	33	Unit
60	Timbangan	2	Unit
61	Nozzle Tester	3	Unit
62	Alat Pengering (Dryer)	1	Unit
63	Alat Penyimpanan hasil Percobaan Lain-lain	1	Unit
64	Unit Pengaduk	5	Unit
65	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	Unit
66	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Unit
67	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	Unit
68	Lemari Besi/Metal	10	Unit
69	Lemari Kayu	21	Unit
70	Rak Besi	26	Unit
71	Rak Kayu	3	Unit



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

<b>NO</b>	<b>SARPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
72	Filing Cabinet Besi	10	Unit
73	Lemari Sorok	4	Unit
74	Lemari Kaca	12	Unit
75	White Board	15	Unit
76	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
77	Mesin Absensi	8	Unit
78	Alat Pemotong Kertas	1	Unit
79	Headmachine Besar	1	Unit
80	Overhead Projector	1	Unit
81	Board Modulux	1	Unit
82	Papan Nama Instansi	2	Unit
83	Papan Pengumuman	6	Unit
84	Papan Tulis	1	Unit
85	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit
86	Meja Kerja Besi/Metal	4	Unit
87	Meja Kerja Kayu	12	Unit
88	Kursi Besi/Metal	48	Unit
89	Sice	1	Unit
90	Meja Rapat	6	Unit
91	Tempat Tidur Besi	8	Unit
92	Meja Resepsionis	3	Unit
93	Meja Tambahan	8	Unit
94	Meja Panjang	10	Unit
95	Meja Bundar	2	Unit
96	Kursi Rapat	29	Unit
97	Kursi Tamu	1	Unit
98	Kursi Putar	42	Unit
99	Meja Komputer	60	Unit
100	Sofa	1	Unit
101	Meja Biro	2	Unit
102	Lemari Pakaian	2	Unit
103	Meja Tulis	27	Unit
104	MOUBILER LAINNYA	12	Unit
105	Jam Elektronik	1	Unit
106	Mesin Pemotong Rumput	7	Unit
107	Mesin Cuci	6	Unit
108	Alat Pembersih Lain-lain	9	Unit
109	Lemari Es	9	Unit
110	A.C. Sentral	2	Unit
111	A.C. Window	47	Unit
112	A.C. Split	42	Unit
113	Kipas Angin	14	Unit
114	Exhaust Fan	2	Unit
115	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	Unit
116	Kompor Gas (Alat Dapur)	9	Unit
117	Teko Listrik	2	Unit
118	Oven Listrik	1	Unit
119	Tabung Gas	4	Unit



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
120	Mesin Giling Bumbu	1	Unit
121	Alat Dapur Lainnya	19	Unit
122	Televisi	26	Unit
123	Sound System	6	Unit
124	Compact Disc	1	Unit
125	Karaoke	1	Unit
126	Microphone Floor Stand	2	Unit
127	Unit Power Supply	12	Unit
128	Camera Video	4	Unit
129	Mesin Jahit	41	Unit
130	Alat Hiasan	3	Unit
131	Tangga Aluminium	11	Unit
132	Dispenser	5	Unit
133	Manequin (Boneka)	6	Unit
134	Gordyin/Kray	138	Unit
135	Alat Pemanas Ruangan	2	Unit
136	Bracket Standing Peralatan	1	Unit
137	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16	Unit
138	Alat Pemadam/Portable	17	Unit
139	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
140	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit
141	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit
142	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit
143	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	Unit
144	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
145	Meja Tamu Biasa	1	Unit
146	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit
147	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
148	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	Unit
149	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Unit
150	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Unit
151	Uninterruptible Power Supply (UPS)	29	Unit
152	Proyektor + Attachment	14	Unit
153	Camera Electronic	7	Unit
154	Video Tape Recorder Portable	1	Unit
155	Camera Wall Box	3	Unit
156	Tripod Camera	2	Unit
157	Camera Film	1	Unit
158	Mesin Cetak Offset Sheet	6	Unit
159	Mesin Jilid	3	Unit
160	Mesin Jahit Benang	2	Unit
161	Kacip Potong Sudut	2	Unit
162	Point Tranter Device	1	Unit
163	Facsimile	2	Unit
164	Handphone	5	Unit
165	Antene UHF Portable	3	Unit
166	Switchwe Antena Lain-lain	1	Unit
167	Bracket Holder	1	Unit



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
168	Boneka	3	Unit
169	Filter	1	Unit
170	Mixer	4	Unit
171	Vacum Pump	1	Unit
172	Wheel Balancer	1	Unit
173	Pressure Gauge (Alat Laboratorium	1	Unit
174	Precision Bevel Protector	1	Unit
175	Alat Uji Untuk Kerja Radiator	2	Unit
176	Micro Meter	41	Unit
177	PLC	8	Unit
178	Vacum Pump	4	Unit
179	Tabung Gas N2	1	Unit
180	Spray Gun	1	Unit
181	Alat Polishing	2	Unit
182	Tang Ampere	8	Unit
183	Stabilizer	1	Unit
184	Power Supply (Alat Laboratorium	8	Unit
185	Voltmeter	1	Unit
186	Cutter	2	Unit
187	Alat Pencuci Botol	6	Unit
188	Signal Generator (Alat Laboratorium	2	Unit
189	Audio Generator	3	Unit
190	Digital Ce Meter	1	Unit
191	Wood Lathe	1	Unit
192	Mesin Jahit Lockstitch	2	Unit
193	Mesin Potong Tegak	1	Unit
194	Mesin Strika Uap	5	Unit
195	Mesin Jahit Lockstitch	2	Unit
196	Mesin Bordir Highspeed	33	Unit
197	Mesin Jahit Pasang Kancing	4	Unit
198	Mesin Jahit Overlock	18	Unit
199	Alat Press Laminasi	1	Unit
200	Micrometer	8	Unit
201	Personal Computer	1	Unit
202	Vernier Calliper (Alat Laboratorium	8	Unit
203	Penyedot Asap Nitrogen	1	Unit
204	Cutting Machine	1	Unit
205	Timing Unit	2	Unit
206	Motor Listrik	45	Unit
207	Alat Peraga Keterampilan Lain-lain	5	Unit
208	Alat Peraga Autotronic Electrical	1	Unit
209	Digital LCR Meter	2	Unit
210	Tachometer (Measuring/testing Device)	2	Unit
211	Infrared Thermometer	2	Unit
212	Tape Recorder (Alat Laboratorium	1	Unit
213	Oscilloscope	2	Unit
214	Exhaust System	1	Unit
215	Ear Tester	2	Unit



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
216	Ampere Meter / Clamp Meter	2	Unit
217	P.C Unit	90	Unit
218	Lap Top	26	Unit
219	Note Book	10	Unit
220	Personal Komputer Lain-lain	1	Unit
221	Hard Disk	6	Unit
222	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
223	CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
224	Monitor	4	Unit
225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52	Unit
226	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
227	External/ Portable Hardisk	1	Unit
228	Polishing Machine/Mesin Poles	2	Unit

Sumber: *Dinperinaker Kota Pekalongan, Desember 2025*

### 1.5 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan (Dinperinaker) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinperinaker Kota Pekalongan yaitu :

1. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja.
2. Kebijakan dan program yang pro job disertai dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja.



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

---

3. Peningkatan jumlah wirausaha baru.
4. Klasifikasi industri kecil menjadi industri menengah/ besar.
5. Perkembangan industri kecil menjadi menengah atau besar cenderung turun.
6. Masih terbatasnya kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing;
7. Masih rendahnya kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk;
8. Masih tingginya tingkat pengangguran;
9. Masih rendahnya ketrampilan pencari kerja/tenaga kerja;
10. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja;
11. Masih banyaknya pencari kerja yang terdaftar yang belum ditempatkan;
12. Belum sebandingnya jumlah kesempatan kerja dengan pencari kerja;
13. Masih banyaknya kasus yang perlu diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).



**BAB II  
PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 dan dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada  
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
<b>VISI</b> : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
<b>Misi ke 2</b> : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan.		
Tujuan Kota : Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,15%
Sasaran Kota : Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49%
Tujuan Dinperinaker : Meningkatkan SDM yang kompeten dan produktif.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49%
Sasaran Dinperinaker : Meningkatkan jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	52,33%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,15%
Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100%
Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	90%
Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6 tenant
Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan	46,67%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yg ditempatkan (dalam & luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota	27,93%
Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota yg dilaksanakan	12,97%



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku
Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase CPMI yang terlayani secara legal	100%
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	52%
Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	41,22%
Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	77,11%
<b>Misi ke 5</b> : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		
Tujuan Kota : Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	37,16 - 37,82 Rp. Juta/jiwa/tahun
Sasaran Kota : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	2,53 - 3,32 %
Tujuan Dinperinaker : Meningkatkan kontribusi perindustrian terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,55%
Sasaran Dinperinaker : Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	2,30%
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	75,34%



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana	4,0%
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait	25%
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi	30%
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100%
Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Infor-masi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	33%
<b>Misi ke 7</b> : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governmen		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien	Indeks Reformasi Birokrasi	73,69 indeks
Sasaran Kota : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	75,07 indeks
Tujuan Dinperinaker : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,62 indeks
Sasaran Dinperinaker : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	75,25 indeks
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100%



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 2.2

Target Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	Nilai SAKIP Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Tahun N-1 yang Bekerja pada Tahun N / Peserta Pelatihan pada Tahun N-1 * 100%	Dinperinaker
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan	Pertumbuhan Industri	persen	Pertumbuhan pdrb sektor industri pengolahan tahun n	BPS

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.3

Target Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	70	71,50	73	75	75,25	75,50
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,17	52,22	52,26	52,29	52,33	52,36
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan	Pertumbuhan Industri	persen	-0,255	0,099	0,085	2,30	2,30	2,30



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	2025		Keterangan
			Satuan	Target	
<b>TUJUAN DINPERINAKEK</b>					
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	80,72	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2	Meningkatkan SDM yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,49	Formulasi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3	Meningkatkan kontribusi perindustrian terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	persen	4,55	Formulasi : (Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2025		Keterangan
			Satuan	Target	
					N-1 dikali 100 Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
<b>SASARAN DINPERINAHER</b>					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	75,25	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,33	Formulasi : Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Tahun N-1 yang Bekerja pada Tahun N / Peserta Pelatihan pada Tahun N-1 * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperinaker
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan	Pertumbuhan Industri	persen	2,30	Formulasi : Pertumbuhan Industri tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 5.084.795.000	APBD
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 306.283.000	APBD
Program Hubungan Industrial	Rp. 594.959.000	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.019.798.000	APBD
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 233.577.000	APBD
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 4.470.000	APBD
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 29.690.000	APBD



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021 – 2026.

#### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

##### ***Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :***

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

## 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,25	75,45	100,27	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,33	53,13	101,52	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri.	persen	2,30	n/a	n/a	Belum Tersedia

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100,90% dengan kategori **“Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”**

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73,40	74,70	75,45	75,45	●
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	61,50	49,26	56,82	53,13	▼
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	persen	4,26	2,3	0,79	n/a	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,45	75,50	99,93	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	53,13	52,36	101,47	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	persen	n/a	2,30	n/a	Belum Tersedia



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan  
Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,45	BB - AA	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	53,13	n/a	n/a	n/a
3.	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	persen	n/a	n/a	n/a	n/a

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) indikator utama Dinperinaker yang tidak dapat dibandingkan dengan indikator pada level Provinsi/Nasional/ Internasional karena perbedaan indikator kinerja dan satuan.

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	80,72	94,83	117,48	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan SDM yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	74,49	75,34	101,14	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	4,55	n/a	n/a	Belum Tersedia data



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 104,86% dengan kategori **“Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”**

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	70	indeks	74,70	75,45	75,25	75,45	100,27	75,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan memperoleh nilai 75,45 atau dengan kategori BB predikat “Sangat Baik”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 3.8 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,75
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>75,45</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		BB "Sangat Baik"	

Tabel 3.9 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025	Predikat
1	Kota Pekalongan	73,28	BB
2	BAPPERIDA	88,70	A
3	DINKOMINFO	83,50	A
4	DLH	85,95	A
5	DINDAGKOP-UMKM	85,70	A
6	INSPEKTORAT DAERAH	84,75	A
7	DPU-PR	83,05	A
8	BPKAD	84,60	A
9	DPMPPA	83,55	A
10	DKP	83,27	A
11	BKPSDM	84,00	A
12	DINDUKCAPIL	82,95	A
13	DINKES	83,25	A
14	SETDA	81,85	A
15	DINDIK	78,50	BB
16	DINPARBUDPORA	78,15	BB
17	DPMPTSP	78,00	BB
18	DINAS PERHUBUNGAN	77,00	BB
19	DINPERPA	76,40	BB
20	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	77,15	BB
21	DINARPUS	76,10	BB
22	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	76,50	BB
23	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	76,65	BB
24	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	76,45	BB
25	BPBD	76,00	BB
26	<b>DINPERINAHER</b>	<b>75,45</b>	<b>BB</b>
27	DINSOS P2KB	76,35	BB
28	DINPERKIM	74,80	BB
29	SATPOL P3KP	75,50	BB
30	SEKRETARIAT DPRD	75,00	BB
31	KESBANGPOL	73,75	BB



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

**Analisis Penyebab**

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu Penetapan (Rp.)</b>	<b>Pagu Perubahan (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.287.000	23.037.000	23.036.700	Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran dan indikator kinerja yang terukur, penguatan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkelanjutan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.028.036.000	5.997.215.000	5.614.260.048	Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.348.000	240.813.000	237.445.724	Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyediaan



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

				sarana dan prasarana perkantoran sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	595.679.000	587.079.000	572.951.671	Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pemenuhan layanan operasional yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan jasa penunjang yang memadai memastikan proses kerja berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai standar, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.954.000	171.654.000	154.157.203	Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kondisi barang milik daerah agar tetap dalam keadaan baik dan optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	- Anggaran Rp23.037.000 - Realisasi anggaran Rp23.036.700 (100%) - Dari total anggaran	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan dengan koordinasi



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Daerah	menunjukkan adanya perencanaan dan penganggaran kinerja yang baik sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang ada.	memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	internal yang efektif, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi kinerja.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp5.997.215.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp5.614.260.048 (93,61%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 6,39% karena adanya pegawai yang pensiun, mutasi dan bebas tugas.</li></ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	Efisiensi waktu dalam proses administrasi keuangan perangkat daerah, yaitu dengan penyelesaian proses administrasi keuangan menggunakan aplikasi SIPD.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp240.813.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp237.445.724 (98,60%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,40% yang berasal dari belanja peralatan dan perlengkapan, karena pada saat proses pengadaan diperoleh harga yang lebih kompetitif dari penyedia, dibandingkan dengan estimasi harga pada tahap perencanaan.</li></ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik sehingga mempercepat proses dan meminimalkan keterlambatan.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp587.079.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp572.951.671 (97,59%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,41% karena adanya pengendalian penggunaan listrik, air, dan telepon. Efisiensi terjadi karena penggunaan dilakukan secara lebih tertib,</li></ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	Optimalisasi komunikasi digital untuk mengurangi pengiriman fisik dokumen serta percepatan koordinasi internal, tanpa mengurangi kualitas pelayanan administrasi.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

	terukur, dan sesuai kebutuhan riil perangkat daerah.		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp171.654.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp154.157.203 (89,81%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 10,19% yang berasal dari penggunaan kendaraan dinas pada tahun berjalan relatif terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan riil operasional, sehingga konsumsi bahan bakar serta kebutuhan pemeliharaan lebih rendah dari estimasi perencanaan.</li></ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	Pemeliharaan barang dilakukan secara rutin sehingga meningkatkan usia pakai fasilitas dan menekan gangguan kerja akibat kerusakan alat.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6,39%), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1,40%), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2,41%), dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (10,19%) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.

**SASARAN 2 : Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan**

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan adalah sebagai berikut :



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	68	persen	49,26	56,82	52,33	53,13	101,52	52,36

Indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dengan indikator kinerja “Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan” dengan target sebesar 52,33% dan terealisasi sebesar 53,13% atau dengan capaian sebesar 101,52%, atau dengan katagori “Sangat Baik”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan untuk urusan ketenagakerjaan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD terkait, stakeholder dan masyarakat sebagai penerima manfaat;
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang/UPTD BLK / LPKS/ Instansi/ Lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Kerjasama yang baik antar tim dan staf terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Meningkatnya partisipasi perusahaan dalam mengikuti kegiatan;
5. Adanya Kerjasama yang baik dari Manajemen / HRD Perusahaan;
6. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Anggaran/ dana yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.886.444.000	4.953.389.000	4.684.210.422	Kegiatan ini mendukung capaian Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.830.000	15.086.000	15.083.100	Kegiatan ini menunjang keberhasilan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja karena meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan agar sesuai standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha. Pembinaan ini memastikan kurikulum, instruktur, dan sarana prasarana lebih optimal, sehingga lulusan memiliki daya saing dan produktivitas yang lebih baik serta mendukung pencapaian target program secara efektif.
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	68.656.000	68.656.000	68.638.575	Kegiatan ini menunjang keberhasilan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan melakukan pembinaan kepada



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

				perusahaan kecil agar perusahaan dapat mengidentifikasi permasalahan, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Melalui pendampingan yang tepat sasaran, kualitas dan produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga mendukung pencapaian target program secara efektif dan berkelanjutan.
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.664.000	47.664.000	47.664.000	Kegiatan ini menunjang keberhasilan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan melakukan monitoring kepada alumni peserta pelatihan untuk memantau alumni siswa pasca pelatihan apakah ketrampilan yang telah diperoleh selama pelatihan sudah tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp4.953.389.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp4.684.210.422 (94,57%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,43% yang berasal dari:</li></ul>	Peserta pelatihan adalah calon peserta yang lolos seleksi administrasi, tertulis dan wawancara.	Pelatihan berbasis kompetensi menggunakan standart jam pelajaran yang sudah terstandarisasi sesuai dengan Kepmen Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/558/HK.03.01/III.2024



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

	Alokasi Anggaran uji kompetensi di perencanaan lebih besar dari realisasi.		tentang Estimasi Biaya Bahan Pelatihan Pada Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Kategori Publik.
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp15.086.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp15.083.100 (99,98%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,02% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan.</li></ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yakni tatap muka dan melalui media komunikasi online sehingga mempercepat waktu pelayanan.
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp68.656.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp68.638.575 (99,97%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,03% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan.</li></ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	Efisiensi waktu pada kegiatan ini dengan penyusunan jadwal kerja yang terencana, penetapan target waktu pada setiap tahapan kegiatan, serta koordinasi yang intensif antara tim pelaksana dan perusahaan sasaran. Seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp47.664.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp47.664.000 (100%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya ketepatan dan kecermatan dalam proses penganggaran, sehingga anggaran dapat terserap maksimal.</li></ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	Efisiensi waktu pada kegiatan ini dengan penyusunan jadwal kerja yang terencana, penetapan target waktu pada setiap tahapan kegiatan, serta koordinasi yang intensif antara tim pelaksana dan perusahaan sasaran. Seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (5,43%), Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (0,02%), dan Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil (0,03%) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan optimal sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik

2. Program Penempatan Tenaga Kerja Kerja

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	158.114.000	138.493.000	136.355.200	Kegiatan ini berupa Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi siswa SMK Kelas XII, pelatihan bagi penyandang disabilitas dan padat karya bertujuan untuk membantu memberi akses bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan informasi kerja, dan peluang kerja.
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	150.530.000	146.530.000	144.849.870	Kegiatan ini berupa pelayanan AK1, Job fair dan penyebaran informasi terkait lowongan pekerjaan yang bertujuan untuk membantu memberi akses bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan informasi kerja, dan peluang kerja.
Pelindungan PMI (Pra dan Purna	41.800.000	21.260.000	20.339.100	Kegiatan ini berupa pelayanan kepada Calon Pekerja Migran



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota			Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk membantu memberi akses bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan informasi kerja khususnya luar negeri, dan peluang kerja.
---------------------------------------	--	--	---

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Rp138.493.000</li> <li>- Realisasi anggaran Rp136.355.200 (98,46%)</li> <li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,54% yang berasal dari: Honor bagi penerjemah tidak terserap karena sasaran pelatihan adalah penyandang disabilitas tuna netra.</li> </ul>	Bahwa calon peserta pelatihan merupakan anggota dari paguyuban disabilitas Kota Pekalongan (tuna netra).	Waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan materi pelatihan dari instruktur dan menyesuaikan waktu peserta pelatihan disabilitas.
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Rp146.530.000</li> <li>- Realisasi anggaran Rp144.849.870 (98,85%)</li> <li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,15% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan.</li> </ul>	Pembuatan kartu kuning (AK1) dan pendaftaran job fair secara online meminimalkan pemeriksaan manual oleh banyak personel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi waktu dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning AK1, yaitu dengan penyelesaian proses administrasi menggunakan aplikasi E-Makaryo.</li> <li>- Efisiensi waktu dalam kegiatan Job fair, yaitu dengan pendaftaran peserta secara online.</li> </ul>
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Rp21.260.000</li> <li>- Realisasi anggaran Rp20.339.100 (95,67%)</li> </ul>	Efisiensi SDM dapat diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas dan terstruktur dengan	Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yakni tatap muka dan melalui media



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

	- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 4,33% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan.	memaksimalkan peran tim internal perangkat daerah, tanpa penambahan tenaga pendukung, sehingga pemanfaatan SDM tetap optimal dan efektif.	komunikasi online sehingga mempercepat waktu pelayanan.
--	---	---	---

### Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota (1,54%), Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (1,15%), dan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota (4,33%) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

### 3. Program Hubungan Industrial

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	82.550.000	62.805.000	60.880.500	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota secara tidak langsung dapat menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini membantu perusahaan/industri untuk menciptakan kondisi kondusif di perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan peningkatan peluang kerja.
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	455.774.000	532.154.000	527.088.800	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota secara tidak langsung dapat menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini membantu perusahaan/industri untuk menciptakan kondisi kondusif di perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan peningkatan peluang kerja.
---	--	--	--	--

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Hubungan Industrial

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran Rp62.805.000 - Realisasi anggaran Rp60.880.500 (96,94%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,06% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan.	Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yakni tatap muka dan melalui media komunikasi online.	Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yakni tatap muka dan melalui media komunikasi online sehingga mempercepat waktu pelayanan.
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	- Anggaran Rp532.154.000 - Realisasi anggaran Rp527.088.800 (99,05%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,95% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan.	Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yakni tatap muka dan melalui media komunikasi online.	Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yakni tatap muka dan melalui media komunikasi online sehingga mempercepat waktu pelayanan.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Hubungan Industrial dengan Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3,06%) dan Kegiatan



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota (0,95%) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik;

2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

### SASARAN 3 : Meningkatnya Pertumbuhan industri

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan industri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Pertumbuhan Industri	n/a	persen	2,30	0,79	2,30	n/a	n/a	2,30

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 3 dengan indikator kinerja “Pertumbuhan Industri” dengan target sebesar 2,30% dan belum terealisasi. Hal tersebut belum dapat diketahui karena data belum dirilis oleh BPS.

Untuk data “**Pertumbuhan Industri**” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Daerah	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Nasional	4,89	4,64	n/a	n/a
2.	Jawa Tengah	3,88	4,32	3,52	n/a
3.	Kota Pekalongan	4,26	2,30	0,79	n/a
4.	Kabupaten Batang	-0,68	5,22	7,57	n/a
5.	Kabupaten Pekalongan	4,10	2,70	2,96	n/a
6.	Kabupaten Pemasang	4,51	4,51	4,34	n/a

Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2025

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

1. Data IKM sudah tersedia dengan baik, dalam mendukung peningkatan kompetensi IKM.
2. Kerjasama dengan para Stakeholder dan Lembaga Masyarakat sudah terjalin dengan baik.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

3. Adanya dukungan sarpras dan penunjang lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

**Faktor penghambat** ketercapaian kinerja sebagai berikut :

1. Terkait data SIINAS, masih banyak IKM yang belum mendaftarkan perusahaan ke sistem SIINAS, sehingga belum diketahui secara pasti data dari masing-masing IKM.
2. Terkait limbah masih ada IKM yang belum mengindahkan aturan terkait pengolahan limbah.
3. Jumlah IKM yang terdaftar di OSS lebih banyak sehingga volume pengawasannya belum bisa optimal karena terbatasnya SDM dan anggaran.

**Upaya perbaikan** guna ketercapaian kinerja sebagai berikut :

1. Mengadakan Sosialisasi SIINAS baik untuk industri kecil maupun perusahaan.
2. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Balai Besar Batik untuk mengadakan Sosialisasi Pelatihan Produksi Bersih terkait pengurangan limbah dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Memprioritaskan kegiatan pengawasan untuk industri dengan resiko menengah tinggi.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	269.560.000	233.577.000	224.592.791	Kegiatan ini berupa sosialisasi, fasilitasi, pelatihan dan pendampingan kepada industri kecil menengah di Kota Pekalongan, sehingga meningkatkan daya saing IKM. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi dan



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

				fasilitasi pendaftaran nomor induk berusaha bagi IKM Batik dan sertifikasi halal produk makanan dan minuman. Pelatihan pemasaran produk melalui digital marketing, serta fasilitasi dan rekomendasi sertifikasi merek bagi IKM batik. Peningkatan daya saing ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi Kota pekalongan pada umumnya.
--	--	--	--	---

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

<b>Kegiatan</b>	<b>Efisiensi Anggaran</b>	<b>Efisiensi SDM</b>	<b>Efisiensi Waktu</b>
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp233.577.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp224.592.791 (96,15%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,85% yang berasal dari efisiensi penggunaan akomodasi dan honor narasumber, sebab pelaksanaan kegiatan bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lain yang menanggung biaya honor narasumber (The Water Agency)</li></ul>	Satu orang petugas verifikator dapat melayani lebih dari satu layanan (fasilitasi merek, dan layanan SIINAS)	Kegiatan pelayanan fasilitasi merek, dan SIINAS dilakukan secara fleksibel (jam kantor) menyesuaikan IKM yang membutuhkan.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (3,85%) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	7.470.000	4.470.000	4.470.000	Kegiatan ini dilaksanakan melalui monitoring dan verifikasi teknis industri kecil menengah berdasarkan kepemilikan nomor induk berusaha. Melalui kegiatan ini, IKM yang memiliki NIB sudah sesuai dengan usaha yang dilaksanakan dan dapat meningkatkan daya saing produk IKM untuk bersaing dengan produk sejenis ditempat lain. Peningkatan daya saing ini berpotensi meningkatkan omset penjualan IKM, pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	- Anggaran Rp4.470.000 - Realisasi anggaran Rp4.470.000 (100%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya ketepatan dan kecermatan dalam proses penganggaran, sehingga anggaran dapat terserap maksimal.	Kegiatan verifikasi teknis ke beberapa layanan dilakukan oleh 6 petugas dengan 1 orang petugas 3 lokasi per hari.	Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan satu tahun dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan dengan sasaran yang sama.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penyerapan anggaran pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota telah terlaksana secara optimal dengan tingkat serapan anggaran yang maksimal;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	33.940.000	29.690.000	29.525.000	Kegiatan ini berupa pemenuhan data dan informasi melalui pendataan industri kecil menengah Kota Pekalongan. Ketersediaan data dan informasi industri dapat digunakan sebagai bahan pembinaan dan intervensi kegiatan yang sesuai dan bermanfaat bagi IKM untuk peningkatan produktivitas.



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Rp29.690.000</li><li>- Realisasi anggaran Rp29.525.000 (99,44%)</li><li>- Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,56% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan.</li></ul>	Efisiensi SDM dilakukan melalui pemilihan kader pendataan terbaik dari masing-masing kelurahan yang memungkinkan kegiatan pelatihan kader menjadi lebih efisien.	Impelentasi dari adanya aplikasi SIPTENAN yang memungkinkan proses inventarisir data yang sudah terkumpul menjadi lebih cepat.

Kesimpulan efisiensi :

1. Penghematan anggaran pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (0,56%) berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik;
2. Produktivitas SDM meningkat;
3. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp13.273.572.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp12.565.548.704,- atau



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

sebesar 94,67%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp7.334.033.000,- dengan realisasi sebesar Rp7.008.964.456,-. atau sebesar 95,57%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
<b>A</b>	<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>			
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			
<b>a</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.</b>			
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.401.030.000	4.142.652.405	94,13
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	420.305.000	414.562.777	98,63
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	132.054.000	126.995.240	96,17
<b>b</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>			
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.086.000	15.083.100	99,98
<b>c</b>	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>			
4	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	68.656.000	68.638.575	99,97
<b>d</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
5	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	47.664.000	47.664.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
<b>e</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
6	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	-	-	-
7	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	25.760.000	25.760.000	100
8	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	14.600.000	12.816.600	87,78
9	Perluasan Kesempatan Kerja	98.133.000	97.778.600	99,64
<b>f</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>			
10	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	62.970.000	62.851.370	99,81
11	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	16.400.000	15.543.500	94,78
12	Job Fair / Bursa Kerja	67.160.000	66.455.000	98,95
<b>g</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
13	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	-
14	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	21.260.000	20.339.100	95,67
<b>III</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			
<b>h</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
15	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.750.000	10.680.000	99,35
16	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	9.405.000	9.399.000	99,94
17	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	42.650.000	40.801.500	95,67
<b>i</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan</b>			



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	<b>Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
18	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.280.000	6.138.500	97,75
19	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	5.480.000	5.279.800	96,35
20	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	9.554.000	7.477.900	78,27
21	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.430.000	59.385.000	96,67
22	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	449.410.000	448.807.600	99,87
<b>B</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>j</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.249.000	6.248.900	100
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.132.000	2.131.900	100
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.656.000	14.655.900	100
<b>k</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.939.539.000	5.556.584.248	93,55



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.700.000	55.699.800	100
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.976.000	1.976.000	100
<b>I</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
<b>m</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.380.000	4.379.800	100
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.027.000	86.988.000	96,62
32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.750.000	3.515.693	93,75
33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.496.000	71.470.900	99,96
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.825.000	7.825.000	100
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.650.000	3.650.000	100
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.685.000	59.616.331	99,88
<b>n</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.840.000	61,33
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.500.000	255.705.940	98,16
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.579.000	315.405.731	97,47
<b>o</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.774.000	91.280.703	83,92
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.100.000	37.100.000	100



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.780.000	28.776.500	99,99
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			
<b>p</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>			
43	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	18.777.000	17.527.000	93,34
44	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30.610.000	28.032.700	91,58
45	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	142.450.000	140.243.091	98,45
46	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30.640.000	27.690.000	90,37
47	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	11.100.000	11.100.000	100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>			
<b>q</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.	4.470.000	4.470.000	100
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			
<b>r</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri</b>			



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
49	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten atau Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26.550.000	26.385.000	99,38
50	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten Kota Melalui SIINas	3.140.000	3.140.000	100



**BAB IV  
P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 117,48 % atau interpretasi sangat baik.
- Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 101,14% atau interpretasi sangat baik.
- Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator dengan capaian nilai n/a atau belum ada interpretasi.
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 100,27% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 101,52% atau interpretasi sangat baik.



## DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

---

➤ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai n/a atau belum ada interpretasi.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) Tujuan dan 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 13.273.572.000,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 12.565.548.704,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **94,67%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 708.023.296,-**.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.565.548.704,- (Dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan adalah 94,67% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinperinaker untuk meningkatkan capaian kinerjanya tahun mendatang, diantara adalah :

1. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih luas antarsektor maupun stakeholder baik dalam hal pelatihan kerja maupun penempatan alumni siswa pelatihan;
2. Perlunya teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/ kegiatan;
3. Adanya upaya Sarana dan prasarana komunikasi harus memadai;



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

4. Mengusahakan adanya bantuan alat dan modal bagi peserta pelatihan kerja dan masyarakat yang akan berwirausaha pasca pelatihan;
5. Peningkatan koordinasi dengan perusahaan dan BKK dalam rangka kegiatan Job Fair untuk meningkatkan angka penempatan sehingga pengangguran dapat ditekan.
6. Melakukan kegiatan pada awal tahun sehingga dapat melakukan evaluasi dalam kegiatan sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia.
7. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Daftar Penetapan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.
8. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.
9. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
10. Perlu dievaluasi schedule kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tertentu sehingga tidak menyulitkan pelaporan pertanggungjawabannya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 24 Februari 2026

**KEPALA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KOTA PEKALONGAN**

**BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690203 199803 2 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)**  
**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	70,00	70,00	71,50	73,00	75,00	75,25	75,50	Inspektorat Daerah	Dinperinaker
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Tahun N-1 yang Bekerja pada Tahun N / Peserta Pelatihan pada Tahun N-1 * 100%	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	52,17	52,17	52,22	52,26	52,29	52,33	52,36	Dinperinaker	Dinperinaker
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun n (data dari BPS)	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	-0,255	-0,26	0,099	0,085	2,30	2,30	2,30	Dinperinaker	Dinperinaker

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kota Pekalongan



**BETTY DAHFANI DAHLAN, S.T.**

Perencana Utama Muda

NIP. 1990203 199803 2 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025



Pihak Kedua,  
Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perindustrian dan  
Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.  
NIP. 19690203 199803 2 004

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,72 indeks	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2.	Meningkatkan SDM yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49 %	Formulasi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3.	Meningkatkan kontribusi perindustrian terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,55 %	Formulasi : (Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N-1 dikali 100 Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Sasaran :</b>				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	75,25 indeks	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	52,33%	Formulasi : Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Tahun N-1 yang Bekerja pada Tahun N / Peserta Pelatihan pada Tahun N-1 * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperinaker
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	2,30%	Formulasi : Pertumbuhan Industri tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperinaker

**Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

**Anggaran**

- Rp. 7.023.448.000
- Rp. 5.084.795.000

**Keterangan**

- APBD-P
- APBD-P

3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 306.283.000	APBD-P
4. Program Hubungan Industrial	Rp. 594.959.000	APBD-P
5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 233.577.000	APBD-P
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota	Rp. 4.470.000	APBD-P
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 29.690.000	APBD-P
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 13.277.222.000</b>	



**H. ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

**Pekalongan, 20 Agustus 2025**  
**Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

**BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.**  
**NIP. 19690203 199803 2 004**